

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malaysia adalah salah satu negara anggota organisasi regional ASEAN. Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini berbatasan dengan Indonesia di sebelah selatan, dengan Thailand di sebelah utara, dan Singapura di sebelah tenggara negara tersebut. Negara ini merupakan bekas jajahan Inggris yang meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Pada 16 September 1963 Federasi Malaya diperbesar dengan bergabungnya Singapura, Sabah dan Sarawak. Masih pada tanggal dan tahun yang sama, nama Malaysia diadopsi untuk menggantikan nama Federasi Malaya. Singapura tidak bertahan lama bergabung dengan Malaysia, hingga akhirnya keluar dari federasi pada 1965. (Agency, 2020) Malaysia termasuk negara berkembang dengan perekonomian yang mengutamakan produsen bahan mentah kemudian sejak tahun 1970-an berpindah ke ekonomi Multi-sektor. (Agency, 2020) Merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional yang berdasarkan sistem parlementer *British Westminster*. (Nations O. W., 2020)

Malaysia sebagai aktor dalam hubungan internasional adalah negara yang sering diperhitungkan perannya oleh negara-negara tetangga. Negara ini sudah menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Dan keaktifannya dalam kegiatan internasional tidak diragukan lagi. Beberapa organisasi internasional tersebut yaitu, IMF, ILO, WHO, UNESCO, Interpol, MINURSO, ASEAN, UN, dan masih banyak lagi lainnya. (Agency, 2020) Malaysia telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali, pada tahun 1956, 1989-1990, 1998-1999, dan terakhir 2015-2016. (Tempo, 2014) Ini membuktikan bahwa Malaysia merupakan negara penting yang diperhitungkan dalam organisasi internasional terutama PBB.

United Nations (UN) atau dikenal dengan PBB adalah salah satu Organisasi Internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

United Nations atau juga dikenal sebagai PBB tidak hanya bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, organisasi ini juga aktif dalam berbagai aspek kehidupan internasional seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan masih banyak lagi lainnya. *United Nations* memiliki 192 negara berdaulat yang menjadi anggota. Peran utama *United Nations* adalah menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan dunia. (Sweden, 2016, hal. 4) Dari peran utamanya tersebut, *United Nations* kemudian memiliki organ penting yang sangat berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan dunia, yaitu *United Nations Security Council* (UNSC). UNSC memiliki lima permanen *member* (*The Big Five*) dan sepuluh *non-permanen member*. Amerika, Inggris, China, Perancis, dan Russia merupakan permanen *member* dari UNSC yang memiliki keistimewaan berupa *veto power*. (AC, 2012) Lima permanen *member* ini dapat dikatakan sebagai pemenang dari *World War II* sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai *The Big Five* dan tidak dapat digantikan dari awal pendiriannya hingga saat ini. (AC, 2012) Sedangkan *non-permanen member* berjumlah sepuluh negara yang sebelum tahun 1965 hanya sebanyak enam *member*. *Non-permanen member* akan berganti setiap dua tahun sekali. (AC, 2012)

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu organ terpenting dalam organisasi PBB. Dewan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan yang tercantum dalam piagam PBB pasal satu ayat satu. Banyak prestasi yang telah diraih oleh PBB dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam menjaga perdamaian dan keamanan, PBB telah mengirimkan 69 misi penjaga perdamaian dan pengamat ke berbagai tempat-tempat di dunia yang tengah berkonflik selama enam puluh tahun terakhir. PBB telah berhasil memulihkan ketenangan dan membantu daerah-daerah berkonflik menyelesaikan masalahnya. Saat ini setidaknya terdapat 16 operasi pemeliharaan perdamaian yang tersebar di seluruh dunia, dengan mengirimkan sekitar 125.000 pria dan wanita dari 120 negara dalam menjalankan misi perdamaian. (UN, UN Peacekeeping, 2018)

PBB telah berkontribusi dalam menyelesaikan konflik dengan menjadi pihak ketiga atau mediator di antara pihak yang berkonflik. Sejak tahun 1990-an telah

berhasil dalam menjadi pihak ketiga, contohnya dalam berbagai konflik seperti Sierra Leone, Liberia, Burundi, konflik utara-selatan di Sudan dan Nepal, dan masih banyak lagi konflik lainnya. PBB telah terbukti menjadi pihak yang dapat menurunkan ketegangan konflik sebesar 40 persen melalui misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di dunia sejak tahun 1990-an. Potensi konflik telah banyak dijinakkan melalui Diplomasi Preventif PBB. Selain itu, 11 misi perdamaian PBB juga ikut andil dalam membahas penanggulangan pasca konflik dan melakukan tindakan perdamaian (UN, UN Peacekeeping, 2018). Dengan menyatukan donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah dan negara-negara yang berkontribusi pasukan, PBB telah mendukung 222 proyek di 22 negara dengan memberikan dana cepat dan fleksibel untuk misi Pembangunan Perdamaian (UN, UN Peacekeeping, 2018).

Pada konflik Rohingya baru-baru ini, PBB bekerja sama dengan Bangladesh dalam menangani kasus kemanusiaan yang melibatkan 600.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar. Walaupun PBB tidak dapat mencampuri masalah tersebut dengan langsung, namun PBB telah memberikan bantuan berupa makanan, pasokan sanitasi, tenda, perawatan kesehatan, dan bantuan penting lainnya kepada para pengungsi (UN, UN Peacekeeping, 2018).

PBB dan Dewan Keamanan PBB secara aktif mendukung Pelucutan Senjata. Demi perdamaian dan keamanan dunia, PBB mengusahakan pelucutan senjata secara global dan pembatasan serta pelarangan kepemilikan senjata nuklir. Secara konsisten, PBB telah bekerja dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan senjata nuklir, menghancurkan senjata kimia, memperkuat larangan terhadap senjata biologis, dan menghentikan proliferasi ranjau darat, senjata kecil dan senjata ringan. Pelucutan senjata diatur dalam Konvensi Senjata Kimia yang diratifikasi oleh 190 Negara, Konvensi Larangan Ranjau oleh 162 negara dan Perjanjian Perdagangan Senjata pada tahun 1969. Pasukan perdamaian PBB secara aktif bekerja dalam pengimplementasian perjanjian pelucutan senjata tersebut di antara pihak yang berkonflik (UN, UN Peacekeeping, 2018).

PBB juga mengkoordinasikan upaya penanganan isu terorisme. Pada tahun 2006, PBB mulai mengadopsi strategi global pertama untuk melawan terorisme.

Badan-badan dan program-program PBB telah membantu negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan terorisme. Negara-negara anggota PBB ikut serta dalam kerja sama internasional melawan terorisme dan telah membuat kerangka hukum yang mengaturnya. Empat belas perjanjian telah disepakati di bawah naungan PBB terkait dengan Terorisme (UN, UN Peacekeeping, 2018).

Dewan Keamanan PBB juga telah secara aktif menanggapi dan menangani permasalahan kepemilikan senjata nuklir. Secara bulat anggota permanen maupun non-permanen DK PBB telah menyetujui pemberian sanksi kepada Korea Utara dalam menanggapi uji coba nuklir dan rudal yang negara tersebut lakukan. Selain bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diperoleh PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia (Nations U. , 10 Ways UN Made World Better Place in 2017, 2017)

Pada *United Nations General Assembly* yang ke-58 (2003), ke-73 (2018), dan ke-74 (2019), Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad (Tun Mahathir), memberikan pidatonya sebagai perwakilan Malaysia. Tun Mahathir, dalam pidatonya, membicarakan berbagai masalah Malaysia dan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi PBB. Dari sekian permasalahan yang dibicarakannya, satu hal yang merupakan *highlight* (garis besar) dari pidato Tun Mahathir. Perdana Menteri Malaysia ini meminta adanya reformasi dalam Dewan Keamanan PBB. Pada pertemuan Majelis Umum PBB yang ke-73 (2018) (Mohamad M. b., Malaysia - Prime Minister Addresses Debate 73rd Session, 2018), ia memberikan argumennya secara tegas bahwa DK PBB harus di reformasi. Kemudian lanjutnya, pada pertemuan ke-74 (September 2019) Majelis Umum PBB (Mohamad M. b., Malaysia - Prime Minister Addresses Debate 74rd Session, 2019), Tun Mahathir kembali menegaskan keinginannya agar adanya reformasi dalam DK PBB. Begitu pula tuntutan yang sama, yang diajukan Tun Mahathir pada tahun 2003 silam pada pertemuan Majelis Umum PBB yang ke-58.

Banyak sekali tokoh-tokoh lainnya yang mewakili negara maupun individunya sendiri yang menginginkan adanya reformasi dalam DK PBB. Mulai dari individu, perwakilan negara, kelompok negara, dan masyarakat internasional menginginkan adanya reformasi, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki posisi dan hak

veto dalam DK PBB. Dari sekian banyak pihak yang menginginkan adanya reformasi Dewan Keamanan PBB, dapat dibilang Tun Mahathir-lah yang paling bersikukuh dan berani secara langsung menyampaikan keinginannya tersebut. Tidak hanya dalam pertemuan rutin Majelis Umum PBB, Tun Mahathir juga menyampaikan keinginannya dalam berbagai wawancara, pertemuan kenegaraan, pertemuan organisasi multilateral, dan lain sebagainya. Apabila tokoh-tokoh lain menyampaikan keinginannya dalam reformasi DK PBB hanya sekali dua kali dalam pertemuan kenegaraan, dan selanjutnya akan menyampaikan tujuan yang lain, berbeda dengan Tun Mahathir yang secara konsisten menyampaikan keinginannya di setiap kesempatan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, Penulis akan menarik Rumusan Masalah, *Mengapa Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menginginkan reformasi Dewan Keamanan PBB?*

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penulisan skripsi ini adalah, penulis sangat berminat dalam isu reformasi Dewan Keamanan PBB. Penulis ingin menjabarkan alasan-alasan yang membuat Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir menginginkan adanya reformasi dalam Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Penulis juga ingin mengajak pembaca ikut setuju dengan tuntutan Tun Mahathir tersebut.

D. Kerangka Berpikir

Dalam menjelaskan keterkaitan latar belakang dan rumusan masalah, penulis akan menggunakan Teori Konstruktivisme (*constructivism*). Teori ini sangat terkenal dalam studi hubungan internasional. Teori konstruktivisme sering digunakan dalam menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkup hubungan internasional. Banyak sekali tokoh-tokoh terkenal yang memberikan gagasannya dalam memandang peristiwa-peristiwa internasional, kemudian mereka mencoba menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut menggunakan kacamata konstruktivisme. Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Kratochwil, Martha Finnemore adalah beberapa tokoh terkenal yang menjadi penyumbang gagasan dalam teori Konstruktivisme.

Dalam teori konstruktivisme, sistem dan hubungan internasional ada karena adanya pemahaman bersama (*shared ideas*) dalam lingkungan internasional. Sistem internasional tidak disusun berdasarkan kekuatan material melainkan dengan ide-ide dan gagasan. Rangkaian ide, kerangka pemikiran, dan sistem norma yang disusun oleh masyarakat, membentuk sebagaimana sistem internasional saat ini. Kemudian sistem internasional akan terus berubah sejalan dengan perubahan ide dan pemikiran manusia (Jackson & Sorensen, 2013).

Kehidupan sosial merupakan dunia yang didasarkan oleh kesadaran manusia, seperti: keyakinan, ide dan konsep, bahasa dan dikursus, tanda, sinyal, dan pemahaman bersama di antara kelompok masyarakat, negara, dan bangsa. Kehidupan sosial itu sendiri adalah sistem internasional yang dibuat oleh manusia dan di dalamnya menjadi tempat mereka tinggal. Berdasarkan pemikiran Alexander Wendt dalam bukunya yang berjudul *Anarchy is what States Make of it* (1992) halaman 73 yang dikutip dari buku Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen,

“Struktur sosial memiliki tiga elemen: Pengetahuan bersama, sumber daya material dan praktik. Pertama, struktur sosial didefinisikan, sebagian, oleh pemahaman bersama, ekspektasi, atau pengetahuan. Hal tersebut membenarkan para aktor dalam situasi dan sifat alamiah hubungan, apakah bersifat kooperatif atau konflikual.” (Jackson & Sorensen, 2013, hal. 371)

Pemahaman bersama menjadi salah satu elemen fokus kaum konstruktivisme. Pemahaman dan pengetahuan bersama akan semakin berguna apabila ide dan pemikiran tersebut disebar luaskan di kalangan masyarakat internasional (konstruksi sosial). Nina Tannenwold menggolongkan empat tipe ide. Dua di antaranya merupakan pemahaman bersama. Dua tipe tersebut yakni, ideologi dan sistem keyakinan bersama, kemudian keyakinan normatif yang memandang benar dan salahnya sesuatu. Keyakinan dan pemahaman bersama ini biasanya berupa nilai-nilai dan ciri-ciri yang menunjukkan salah atau benarnya suatu hal. (Jackson & Sorensen, 2013, hal. 374)

Lingkungan internasional sangat penting dalam pembentukan identitas negara. Struktur sosial hanya akan muncul apabila aktor-aktor sosial melakukan tindakan

dan kehendak masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan dan pembentukan struktur sosial. Semakin sering interaksi yang terjadi di masyarakat, kelompok, bangsa atau negara, semakin cepat pula suatu identitas dan keyakinan suatu negara akan mempengaruhi negara lain ataupun sistem internasional.

Elemen fokus selanjutnya dalam konstruktivisme selain pemahaman bersama yaitu, norma-norma masyarakat internasional dan bagaimana mereka mempengaruhi identitas dan kepentingan suatu negara. Perilaku negara digambarkan sebagai identitas dan kepentingan. Identitas dan kepentingan diartikan sebagai kekuatan internasional yang mana norma-norma perilaku yang ditanamkan dalam ranah masyarakat internasional. Organisasi internasional menjadi agen dalam pertukaran norma-norma masyarakat internasional di antara negara-negara anggota. Hal ini kemudian mempengaruhi pembentukan kebijakan internasional yang akan diajarkan kepada negara-negara mengenai apa yang menjadi kepentingan suatu negara. (Jackson & Sorensen, 2013, hal. 381)

Menurut Martha Finnemore, organisasi internasional memiliki peran penting dalam penyebarluasan norma-norma internasional. Norma-norma internasional yang disebarkan oleh organisasi internasional dapat mempengaruhi negara-negara untuk menganut norma-norma tersebut dalam kebijakan domestik mereka. Hal ini dikarenakan organisasi internasional memiliki kekuasaan internasional untuk mengontrol perilaku para anggota dengan salah satu caranya yaitu menetapkan suatu agenda pertemuan dan konferensi yang diadakan atas nama organisasi tersebut. Maka dari itu, pembahasan dari suatu agenda ataupun konferensi biasanya dipengaruhi oleh kepentingan para anggota negara hingga pemutusan suatu kebijakan (Jackson & Sorensen, 2013, hal. 384).

Konstruktivisme menganggap komunikasi simbolik mempertahankan kemurnian gagasan para agen/tokoh. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan, identitas dan tujuan merupakan 'bahan mentah' dari komunikasi simbolik. Maka dari itu komunikasi simbolik mengandung orisinalitas yang tinggi. Kemudian 'bahan jadi' dapat berupa fakta-fakta. 'Bahan mentah' dapat berupa pernyataan para tokoh (*speech act*) sementara 'bahan jadi' dapat berupa dokumen resmi suatu lembaga (kebijakan, peraturan. Perjanjian, dll.). Bahan jadi cenderung penuh

dengan rekayasa. (Ambarwati & Wijatmadja, 2016) Kemudian kita dapat melihat bagaimana bahasa yang disampaikan dengan pembicaraan (*speech act*) mempunyai kekuatan konstitutif. Maka dari itu Nicholas Onuf menyarankan *speech act* yang seseorang tampilkan dapat menunjukkan motivasi dan intensi seseorang. (Ambarwati & Wijatmadja, 2016)

Desakan mengenai reformasi mengenai Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Mahathir Mohamad dapat dilihat sebagai *speech act* sesuai dengan gagasan Nicholas Onuf. *Speech act* seseorang mampu menggambarkan motivasi dan intensi orang tersebut. *Speech act* tersebut juga mengandung orisinalitas yang tinggi karena tidak ada campur tangan dari pihak lain. Pada pidato Tun Mahathir dalam pertemuan rutin Majelis Umum PBB yang ke-58, 73, dan 74, menjelaskan beberapa alasan mengapa DK PBB butuh direformasi. Selain Malaysia banyak juga individu, negara-negara, kelompok negara, bahkan masyarakat internasional yang menginginkan adanya reformasi dalam Dewan Keamanan PBB.

Dari pernyataan perdana menteri Tun Mahathir, penggunaan hak veto oleh kelima negara tetap DK PBB sudah tidak sesuai dengan zaman yang semakin berkembang. Identitas Malaysia yang dipengaruhi oleh beberapa unsur tersebut yang mempengaruhi kepentingan negara Malaysia di politik internasional terutama dalam pertemuan rutin Majelis Umum PBB. Kepentingan dan identitas negara Malaysia dapat dilihat secara jelas dalam *speech act* perdana menteri Tun Mahathir dalam pertemuan rutin Majelis Umum PBB yang ke-58, 73, dan 74.

Agenda rutin Majelis Umum PBB yang setiap tahun diadakan dengan kehadiran seluruh anggota PBB, menjadi salah satu ajang berbagai negara dalam menyampaikan kepentingan negara mereka. Anggapan bahwa DK PBB tidak mampu dalam menangani ataupun mengatasi isu-isu keamanan dan perdamaian internasional rupanya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Dewan ini juga dianggap melakukan *abuse of power* dalam mencapai kepentingan nasional mereka. Selain itu kepemilikan hak veto dan rentang waktu negara yang memiliki hak tersebut menjadi anggota tetap DK PBB tidak jelas sampai kapan, yang tentu saja sudah tidak relevan dengan dunia yang semakin modern dibandingkan dengan keadaan internasional dari 70 tahun lebih yang lalu.

Kepemilikan hak Veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang sampai saat ini tidak dapat digantikan oleh negara mana pun, menyebabkan munculnya pemikiran negatif dan ide baru di kalangan masyarakat internasional. Pemikiran bersama tersebut kemudian berubah menjadi nilai-nilai yang meyakini bahwa DK PBB menjalankan tugasnya dengan tidak adil. Nilai dan norma tersebut yang kemudian memengaruhi kepentingan negara-negara dalam tuntutan reformasi Dewan Keamanan PBB, terutama Malaysia. Dalam hal ini organisasi internasional, PBB, sangat memiliki peran penting dalam penyebaran pemikiran bersama mengenai reformasi DK PBB. Norma-norma internasional mengenai ide tersebut sangat cepat berkembang dan menyebar luas mempengaruhi negara-negara lain melalui interaksi para anggota negara yang berlangsung setiap satu tahun sekali dalam Majelis Umum PBB.

Kelima negara anggota tetap DK PBB, hingga saat ini masih memegang dan memiliki hak veto sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Adanya nilai, norma, ingatan sejarah, dan pemahaman bersama tentang tuntutan negara-negara anggota PBB bahkan masyarakat internasional, menganggap DK PBB tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Malaysia dan masyarakat internasional maupun negara-negara anggota PBB yang lain, menganggap DK PBB tidak mampu dalam merepresentasikan atau mewakili kepentingan dan pandangan negara-negara lain. (Satria, 2020) Hal tersebut sangat mempengaruhi pembentukan identitas negara Malaysia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Pemahaman bersama dan norma masyarakat yang berkembang dalam organisasi internasional PBB mengenai Reformasi Dewan Keamanan PBB sudah sangat lama diperbincangkan. Semakin lama ide reformasi DK PBB diperbincangkan semakin besar pula kemungkinan ide tersebut mempengaruhi pemikiran masyarakat internasional yang dapat mengubah struktur sosial. Norma-norma dan pemahaman bersama yang berkembang dalam organisasi tersebut semakin lama terus mempengaruhi setiap negara anggota PBB dalam menentukan identitas dan kepentingan mereka. Hal ini juga berlaku terhadap negara Malaysia

yang merupakan salah satu negara anggota PBB yang sangat aktif dalam interaksi politik maupun ekonomi antar negara anggota PBB yang lain.

E. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan teori yang telah dijelaskan, maka dapat diambil Hipotesa sebagai berikut. Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, menginginkan adanya reformasi dalam Dewan Keamanan PBB karena:

Perdana menteri Malaysia, Tun Mahathir dipengaruhi oleh adanya Pemahaman Bersama (*shared ideas*) dan nilai-nilai keadilan yang menjadi norma internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini, Penulis meneliti alasan (*reason*) dan maksud (*intention*) keinginan Perdana Menteri Malaysia mengenai tuntutan reformasi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2003 dan 2018-2019. Yang kebetulan pada tahun itu, Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 (2003) dan ke-7 (2018-2019).

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian masalah menggunakan penelitian kualitatif eksplanatif. Metode yang digunakan berupa studi pustaka (*library reaserch*) untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penulisan skripsi. Data-data tersebut diambil dari data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, berita Online, internet, dan lain-lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang menjelaskan dan menggambarkan tentang isi penulisan penulis. Sistematika penulisan tersebut seperti berikut.

Pada BAB I Pendahuluan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Kemudian selanjutnya pada BAB II dengan judul “Malaysia Sebagai Negara Berdaulat” berisikan latar belakang politik dan kebijakan luar negeri negara Malaysia yang di jelaskan secara terperinci.

Pada BAB III dengan judul “Dewan Keamanan PBB Sebagai Penjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional”, memaparkan pembentukan, tujuan, visi/misi, dan peranan PBB dan DK PBB dalam Keamanan dan Perdamaian Dunia. Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa contoh prestasi dan kegagalan yang pernah diraih oleh DK PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Pada bab selanjutnya, yaitu BAB IV dengan judul “Tuntutan Mahathir Mohamad dalam Reformasi Dewan Keamanan PBB”. Bagian ini menjelaskan secara terperinci keinginan Tun Mahathir dalam me-reformasi Dewan Keamanan PBB melalui pidatonya (*Speech act*) di United Nations General Assembly yang ke-58, ke-73, dan ke-74. Terakhir keinginan Tun Mahathir tersebut dijelaskan menggunakan kaca mata konstruktivisme.

Terakhir pada BAB V Penutup, berisikan Kesimpulan skripsi secara keseluruhan dari penulis.